

TRANSFORMASI PELAYANAN DIGITAL MELALUI SP2D DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN SUMENEP

Oleh:

Roos Yuliasitina¹⁾, Mariyana Ulfa²⁾, Ameliya Nurdiana Putri³⁾, Nurul Jannah⁴⁾, Nail Kamala⁵⁾,
Moh. Imam Gazali⁶⁾, Muhammad Naqa Fairuz⁷⁾

FISIP Universitas Wiraraja Madura

Email: tina.fisip@wiraraja.ac.id

Abstract

Digital transformation has become an urgent need in governance, especially in efforts to improve the effectiveness, efficiency, and transparency of public services. In Sumenep Regency, the Communication and Informatics Agency (Diskominfo) has taken a strategic step by implementing the Regional Government Information System (SIPD) and the Fund Disbursement Order Administration System (SP2D). Both systems aim to support the digitalization of regional financial management in a more integrated, accountable, and real-time manner. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of SIPD and SP2D and identify various challenges faced in their implementation. The methods used include direct observation of system operational activities, interviews with implementing officials, and documentation studies during the implementation of Field Work Practices (PKL) in the Sumenep Regency Diskominfo environment. The results of the study indicate that the implementation of SIPD and SP2D has a positive contribution to the efficiency of the financial administration process, accelerating the time for disbursement of funds, and increasing transparency in budget reporting and accountability. However, there are a number of technical and non-technical obstacles, such as frequent system disruptions (errors) in the SIPD application, limited internet network infrastructure, and lack of training and understanding of human resources (HR) regarding the digital system. Therefore, continuous system improvement, increased HR capacity, and adaptive regulatory support are needed so that digital transformation in regional financial management can run optimally, efficiently, and sustainably.

Keywords: *Digital transformation and public services*

Abstrak

Transformasi digital telah menjadi kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam upaya meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi pelayanan publik. Di Kabupaten Sumenep, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) telah mengambil langkah strategis dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Penatausahaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Kedua sistem ini bertujuan untuk mendukung digitalisasi pengelolaan keuangan daerah secara lebih terintegrasi, akuntabel, dan real time. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SIPD dan SP2D serta mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode yang digunakan meliputi observasi langsung terhadap kegiatan operasional sistem, wawancara dengan aparatur pelaksana, serta studi dokumentasi selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD dan SP2D memberikan kontribusi positif terhadap efisiensi proses administrasi keuangan, mempercepat waktu pencairan dana, serta meningkatkan transparansi dalam pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran.

Namun, terdapat sejumlah kendala teknis dan non-teknis, seperti seringnya gangguan sistem (error) pada aplikasi SIPD, keterbatasan infrastruktur jaringan internet, serta kurangnya pelatihan dan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap sistem digital tersebut. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas SDM, serta dukungan regulasi yang adaptif agar transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan optimal, efisien, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Transformasi digital dan pelayanan publik

1. PENDAHULUAN

Transformasi digital adalah perubahan fundamental dalam cara bisnis beroperasi, menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kinerja dan daya saing. Manfaatnya meliputi peningkatan efisiensi, inovasi, dan kepuasan pelanggan. Namun, proses ini menghadirkan tantangan seperti perubahan budaya organisasi dan integrasi teknologi. Keberhasilan memerlukan strategi yang komprehensif dan komitmen untuk beradaptasi dengan perubahan yang cepat di era digital. Transformasi digital, meskipun menjanjikan peningkatan efisiensi dan daya saing, memerlukan perubahan signifikan dalam budaya dan operasional bisnis. Tantangannya mencakup adaptasi terhadap teknologi baru, peningkatan literasi digital karyawan, integrasi sistem yang ada, dan memastikan keamanan data pelanggan. Untuk mengatasi hal ini, organisasi perlu berinvestasi dalam pelatihan karyawan, mengembangkan budaya inovasi dan kolaborasi, serta mengadopsi pengambilan keputusan berbasis data. Sukses dalam transformasi digital membutuhkan strategi

yang komprehensif dan komitmen jangka Panjang (Erwin et al., 2023).

Transformasi digital menuju pemerintahan cerdas (smart government) di Indonesia merupakan upaya yang menjanjikan, namun keberhasilannya sangat bergantung pada kemampuan sumber daya manusia (SDM) di seluruh lapisan masyarakat dan pemerintahan. Pemahaman dan keahlian dalam memanfaatkan teknologi digital menjadi kunci utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Konsep pemerintahan digital, yang diwujudkan melalui penerapan Digital Government dan inisiatif Smart City, diharapkan mampu mengatasi kompleksitas permasalahan pemerintahan dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara optimal, diharapkan proses birokrasi dapat dipercepat, transparansi ditingkatkan, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pemerintahan semakin besar. Namun, implementasi pemerintahan digital ini tidak akan berjalan mulus tanpa

SDM yang kompeten. Kesenjangan digital, berupa kurangnya pemahaman dan keahlian dalam mengoperasikan teknologi digital, dapat menjadi penghambat utama. Oleh karena itu, investasi dalam pengembangan kapasitas SDM, termasuk pelatihan dan pendidikan di bidang teknologi informasi, merupakan hal yang krusial. Pemerintah perlu berkomitmen untuk menyediakan akses yang merata terhadap teknologi dan pelatihan yang berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga potensi teknologi digital dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia. Keberhasilan transformasi digital ini bukan hanya terletak pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kemampuan SDM dalam mengoptimalkan pemanfaatannya (Soraya et al., 2023).

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep berperan sebagai jembatan komunikasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Tugas utamanya meliputi pelayanan informasi publik, penyebaran informasi melalui berbagai saluran, pengelolaan hubungan dengan media massa, serta penyusunan dan penyebaran rilis pers (press release). Dalam rangka mensosialisasikan program digitalisasi

birokrasi yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep, Dinas Kominfo memainkan peran krusial. Mereka menciptakan narasi berita yang informatif dan mudah dipahami, kemudian menyebarkannya melalui berbagai platform media resmi milik pemerintah, termasuk situs web dan media sosial. Berita-berita ini juga difungsikan sebagai rilis pers yang disebarluaskan kepada wartawan dan awak media lainnya, yang kemudian akan meneruskan informasi tersebut kepada masyarakat luas melalui media masing-masing. Program dan kegiatan digitalisasi birokrasi ini sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat, sehingga upaya publikasi dan diseminasi informasi yang dilakukan oleh Dinas Kominfo merupakan bagian integral dari tugas pokok dan fungsi mereka sebagai humas Pemerintah Kabupaten Asahan. Dengan demikian, Dinas Kominfo memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan dengan menyampaikan informasi secara efektif dan efisien kepada seluruh lapisan masyarakat (Publik & Dan, 2023)

Digitalisasi pelayanan publik di Kabupaten Sumenep melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) merupakan proses transformasi yang terus berkembang, bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan efektivitas

pelayanan kepada masyarakat. Namun, proses ini dihadapkan pada berbagai tantangan. Sebelum penerapan sistem digital secara luas, pelayanan publik di Diskominfo menghadapi kendala seperti proses administrasi manual yang menyebabkan proses lebih lama, rentan kesalahan, dan kurang efisien. Transformasi digital menjadi faktor krusial dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di era modern. Pemerintah Kabupaten Sumenep, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), telah berupaya untuk mewujudkan hal ini dengan mengimplementasikan berbagai sistem digital, termasuk Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD) dan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah (SP2D) yang terintegrasi dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). Implementasi SIPD dan SP2D bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, sekaligus mempercepat proses pencairan dana. Harapannya, kedua sistem ini dapat mengatasi kendala pelayanan publik yang sebelumnya ada, seperti proses administrasi manual yang lambat dan rawan kesalahan, serta akses informasi publik yang terbatas.

Indonesia, termasuk di Kabupaten Sumenep, mendapat landasan hukum dari beberapa peraturan perundang-undangan. Tidak ada satu payung hukum tunggal, melainkan beberapa peraturan yang saling berkaitan dan mengatur aspek-aspek berbeda dari sistem ini. Berikut beberapa payung hukum utama:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah: UU ini merupakan landasan hukum utama bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pengelolaan keuangan daerah yang menjadi fokus SIPD. UU ini memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019): PP ini merupakan peraturan pelaksanaan dari UU 23/2014, dan secara spesifik mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah, termasuk sistem informasi yang digunakan. PP 12/2019 mengatur tentang tata cara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban

keuangan daerah. Implementasi SIPD sejalan dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam PP ini.

c. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD): Permendagri ini merupakan peraturan teknis yang mengatur secara detail tentang implementasi dan penggunaan SIPD. Permendagri ini memberikan pedoman teknis terkait pengembangan, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem SIPD, termasuk spesifikasi teknis, standar keamanan data, dan alur kerja.

d. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN): Meskipun SP2D berada di bawah naungan SPAN (yang dikelola Kementerian Keuangan), peraturan-peraturan Kementerian Keuangan terkait SPAN (yang jumlahnya cukup banyak dan sering diperbarui) menjadi payung hukum bagi integrasi SP2D dengan sistem keuangan daerah. PMK ini mengatur mekanisme pencairan dana melalui SPAN, termasuk persyaratan, prosedur, dan keamanan transaksi.

Keempatnya saling berkaitan dan membentuk kerangka hukum yang komprehensif untuk penggunaan SIPD dan

SP2D di Kabupaten Sumenep. Meskipun penggunaan SIPD dan SP2D menjanjikan berbagai manfaat, proses transformasi digital di Diskominfo Kabupaten Sumenep masih menghadapi beberapa tantangan. Penelitian ini akan menelaah secara detail penggunaan SIPD dan SP2D di Diskominfo Kabupaten Sumenep, dengan fokus pada kontribusinya terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan efektivitas pelayanan publik. Lebih lanjut, penelitian ini akan mengidentifikasi permasalahan yang masih muncul pasca penggunaan kedua sistem tersebut. Penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Ketatausahaan Surat Pemerintah Kerja (SP2D) di Kabupaten Sumenep menghadapi dua tantangan utama yang perlu segera diatasi. Pertama, dan yang paling krusial, adalah tingginya angka error pada sistem SIPD. Sistem SIPD yang sering mengalami gangguan ini berdampak langsung pada operasional SP2D, karena SP2D sepenuhnya bergantung pada fungsi dan kinerja SIPD. Kegagalan atau error pada SIPD akan menyebabkan terhambatnya seluruh proses yang berkaitan dengan SP2D, berpotensi menimbulkan penundaan dan ketidakefisienan dalam pengelolaan keuangan daerah. Perbaikan sistem SIPD menjadi prioritas utama untuk memastikan kelancaran administrasi

pemerintahan. Kedua, ancaman siber merupakan risiko yang tidak dapat diabaikan. Sistem digital, termasuk SIPD dan SP2D, rentan terhadap berbagai serangan siber yang dapat mengakibatkan kebocoran data, gangguan layanan, dan kerugian finansial. Oleh karena itu, penguatan keamanan siber menjadi sangat penting untuk melindungi integritas data dan operasional sistem, menjamin keamanan informasi pemerintahan, dan mencegah potensi kerugian yang lebih besar. Kedua tantangan ini memerlukan perhatian serius dan solusi komprehensif dari Diskominfo Kabupaten Sumenep untuk memastikan keberhasilan transformasi digital dan peningkatan kualitas layanan publik. Dengan penggunaan SIPD dan SP2D serta mengidentifikasi permasalahan yang masih ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif kepada Diskominfo Kabupaten Sumenep untuk mencapai optimalisasi transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

2. TINJAUAN TEORITIS

Transformasi Digital merupakan salah satu inovasi pelayanan dalam dunia birokrasi. Banyak hasil penelitian yang berkaitan dengan transformasi digital

dimana transformasi digital pelayanan menjadi sebuah tinjauan literatur pada Sektor Bisnis dan Pemerintahan"(Pangandaheng et al., 2022) melakukan tinjauan literatur sistematis terhadap 9 artikel jurnal internasional untuk menganalisis strategi penerapan transformasi digital di sektor bisnis dan pemerintahan. Penelitian ini menemukan bahwa strategi di sektor bisnis berfokus pada sinergi pengembangan produk baru, integrasi nilai budaya, dan keterlibatan manajemen puncak. Di sektor pemerintahan, komitmen pemangku kepentingan dan peran kepemimpinan menjadi kunci. Strategi umum meliputi penciptaan nilai publik (ekonomi, administrasi, kemasyarakatan, dan demokrasi) serta pengembangan pengetahuan tentang manajemen proyek transformasi digital. Kesimpulannya menekankan bahwa meskipun transformasi digital menjadi keharusan, tingkat transformasinya harus relevan dengan kemampuan organisasi.

(Hadiono & Noor Santi, 2020) transformasi digital sebagai sebuah evolusi radikal yang memanfaatkan teknologi digital. Artikel ini menelaah pengertian transformasi digital, faktor pendorongnya (termasuk regulasi, persaingan, pergeseran industri ke bentuk digital, dan perubahan

perilaku konsumen), tujuan transformasi digital, serta dampaknya (teleworking, substitusi pegawai). Kesimpulannya menekankan perlunya kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital, termasuk penyesuaian strategi, peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan adaptasi infrastruktur. Artikel ini juga menyoroti dampak positif dan negatif transformasi digital serta pentingnya antisipasi terhadap perubahan tren dan pengembangan keterampilan SDM.

Pentingnya transformasi digital dalam layanan publik, termasuk di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep. Ketiga jurnal ini memiliki fokus yang berbeda, namun semuanya membahas pentingnya digitalisasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Jurnal-jurnal tersebut, yang diterbitkan dalam rentang waktu 2020–2025, berkontribusi terhadap pemahaman mengenai strategi komunikasi efektif dalam manajemen perubahan (Nurrosyidah, 2021), strategi penerapan transformasi digital di sektor pemerintahan (Pangandaheng et al., 2022), serta pentingnya kesiapan organisasi dalam menyongsong transformasi digital (Hadiono & Santi, 2020). Digitalisasi

layanan publik di Diskominfo Kabupaten Sumenep sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Akan tetapi, keberhasilannya bergantung pada kesiapan kelembagaan, sumber daya manusia, regulasi yang memadai, dan infrastruktur yang mendukung. Oleh karena itu, laporan ini menganalisis tingkat kesiapan aspek-aspek tersebut dan strategi penanggulangan tantangannya di Kabupaten Sumenep.

Untuk memperkaya pemahaman mengenai transformasi digital dalam konteks peningkatan kualitas layanan publik di lingkungan Diskominfo Kabupaten Sumenep, tinjauan pustaka ini selanjutnya akan diperluas dengan memasukkan kerangka teori pelayanan publik, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pelayanan digital. Hal ini penting untuk memberikan landasan teoritis yang lebih komprehensif dalam menganalisis kesiapan dan strategi penanggulangan tantangan transformasi digital di Kabupaten Sumenep.

Transformasi adalah proses inovasi yang digerakkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, melibatkan perubahan mendasar yang menuntut pergeseran paradigma berpikir dan bertindak. Berfokus pada masa depan, transformasi menandai awal dari perubahan signifikan

yang dipicu oleh perkembangan teknologi (Murwati & Asroriyah, 2020). Untuk itu, tinjauan pustaka ini akan melanjutkan dengan mengkaji teori-teori pelayanan digital yang akan digunakan sebagai landasan untuk menganalisis kesiapan dan strategi penanggulangan tantangan transformasi digital di Diskominfo Kabupaten Sumenep. Teori-teori ini akan memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana pelayanan publik yang efektif dan efisien dapat dibangun dalam lingkungan digital.

E-Government Heeks 2006:3 (Rifdan et al., 2024) adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan yang diberikan kepada masyarakat, meningkatkan efisiensi operasional, dan meningkatkan partisipasi warga dalam proses pemerintahan. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Sumenep, dalam konteks E-Government seperti yang dijelaskan oleh Heeks (2006:3) dan dikaji lebih lanjut oleh Rifdan dkk. (2024), berperan krusial dalam meningkatkan layanan publik. Melalui pemanfaatan teknologi informasi, Diskominfo Sumenep berupaya meningkatkan efisiensi operasional pemerintahan daerah, memudahkan akses informasi bagi masyarakat, dan mendorong partisipasi

warga dalam pembangunan. Implementasi berbagai program digital, seperti portal informasi pemerintah daerah dan layanan online, mencerminkan komitmen Diskominfo Sumenep dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Keberhasilan upaya ini akan berdampak positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Sumenep.

3. METODE PENELITIAN

Pengumpulan data untuk penelitian ini dilakukan secara komprehensif melalui beberapa metode. Observasi langsung di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menjadi metode utama. Melalui observasi ini, peneliti akan mengamati secara detail alur kerja dan proses pelayanan informasi dan komunikasi publik di Diskominfo. Tujuannya adalah untuk memahami secara mendalam sistem yang berjalan saat ini dan mengidentifikasi potensi tantangan atau hambatan. Wawancara mendalam juga akan dilakukan dengan berbagai pihak di Diskominfo, termasuk staf, pimpinan, dan pihak-pihak terkait lainnya. Wawancara ini bertujuan untuk menggali persepsi, harapan, dan kebutuhan mereka terkait

Sebagai data pendukung, peneliti akan melakukan studi literatur dan studi dokumen, meliputi pengumpulan dan analisis dokumen-dokumen penting seperti pedoman operasional, laporan kinerja, peraturan terkait, dan berbagai materi terkait lainnya dari arsip Diskominfo. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi (Jhon W Creswell, 2017).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep adalah lembaga yang berfokus pada pelayanan publik di bidang informasi dan komunikasi. Seluruh layanan yang disediakan ditujukan untuk berbagai kalangan, termasuk Pemerintah Kabupaten Sumenep, instansi pemerintah terkait, media massa, serta masyarakat umum di Kabupaten Sumenep. Layanan Diskominfo meliputi penyediaan informasi publik, pengelolaan media sosial pemerintah, pengembangan website resmi pemerintah daerah, dan dukungan teknis terkait komunikasi dan informasi. Salah satu transformasi penggunaan digital yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sumenep yaitu penggunaan salah satu sistem untuk menghitung gaji dan pajak seluruh karyawan di Diskominfo Sumenep yaitu menggunakan

sistem SIPD dan SP2D. Sebelum penggunaan sistem SIPD dan SP2D, Diskominfo memiliki beberapa kendala yaitu sering mengalami gangguan ini berdampak langsung pada operasional SP2D, mengingat SP2D sepenuhnya bergantung pada fungsi dan kinerja SIPD. Kegagalan atau error pada SIPD menyebabkan terhambatnya seluruh proses yang berkaitan dengan SP2D, termasuk pencairan dana, pembuatan laporan, dan pengawasan anggaran. Penundaan yang diakibatkan oleh error sistem ini bukan hanya mengurangi efisiensi kerja, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian finansial bagi Diskominfo Kabupaten Sumenep. Proses pencairan dana yang tertunda dapat menyebabkan keterlambatan pembayaran kepada vendor atau rekanan, menimbulkan masalah administrasi, dan bahkan berdampak negatif pada reputasi Diskominfo. Ketidakkakuratan data yang diakibatkan oleh error pada SIPD juga berpotensi menimbulkan kesalahan perhitungan, baik dalam hal penganggaran maupun pelaporan keuangan. Kesalahan seperti ini dapat berdampak serius dan menimbulkan konsekuensi hukum. Oleh karena itu, menangani permasalahan error pada SIPD bukan hanya masalah efisiensi, tetapi juga menyangkut akuntabilitas, transparansi, dan bahkan aspek legalitas pengelolaan keuangan di Diskominfo. Namun sesudah penerapan SIPD dan SP2D

memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan uang, tingginya angka error pada SIPD dan SP2D menjadi kendala yang sangat signifikan dan memerlukan perhatian serius.

Berikut perbandingan kondisi sebelum dan sesudah penggunaan SIPD dan SP2D di Dinas Komunikasi dan Informatika disajikan pada tabel berikut:

No	Sebelum penggunaan SP2D	Sesudah penggunaan SP2D
1.	Proses pencairan dana lambat dan rumit, dan melibatkan banyak tahapan manual.	Proses pencairan dana lebih cepat dan efisien, terintegrasi secara digital.
2.	Rentan terjadi kesalahan human error dalam perhitungan dan pencatatan.	Akurasi data meningkat, meminimalisir kesalahan human error.
3.	Transparansi dan akuntabilitas rendah, sulit melacak alur dana.	Transparansi dan akuntabilitas tinggi, alur dana terlacak secara real time.
4.	Dokumentasi dan arsip masih manual, membutuhkan ruang penyimpanan yang besar.	Dokumentasi dan arsip tersimpan secara digital, mudah diakses dan di backup.
5.	Kerja sama antar bagian kurang efektif karena keterbatasan informasi.	Kerjasama antar bagian lebih efektif dan terintegrasi berkat system SP2D.
6.	Risiko penyalahgunaan anggaran lebih tinggi.	Risiko penyalahgunaan anggaran berkurang karena sistem pengawasan yang lebih ketat.
7.	Membutuhkan banyak tenaga dan waktu untuk mengelola keuangan.	Efisiensi tenaga dan waktu meningkat karena otomatisasi proses.
8.	Sulit melakukan monitoring dan evaluasi kinerja keuangan.	Monitoring dan evaluasi kinerja keuangan lebih mudah dan akurat.
9.	Potensi terjadinya keterlambatan pembayaran kepada vendor/rekanan.	Pembayaran kepada vendor/rekanan lebih tepat waktu.
10.	Laporan keuangan kurang akurat dan terlambat.	Laporan keuangan lebih akurat dan tepat waktu.

KESIMPULAN

Penggunaan SIPD dan SP2D di Diskominfo Kabupaten Sumenep menunjukkan dampak positif pada efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan, terbukti dari percepatan pencairan dana dan kemudahan akses informasi. Namun, masalah error yang

sering terjadi pada SIPD menjadi kendala utama, mengakibatkan terhambatnya proses kerja dan potensi kesalahan perhitungan. Keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, terutama akses internet yang tidak merata, juga turut memperburuk situasi. Untuk mencapai optimalisasi, perbaikan sistem SIPD,

peningkatan infrastruktur teknologi informasi, khususnya perluasan akses internet yang stabil dan cepat, merupakan langkah krusial. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting untuk memastikan pemanfaatan sistem secara optimal. Dengan mengatasi kendala teknis dan sumber daya manusia, potensi peningkatan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan di Diskominfo Kabupaten Sumenep dapat diwujudkan sepenuhnya

5. PENUTUP

Penelitian ini menegaskan pentingnya transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, khususnya melalui penggunaan SIPD dan SP2D. Meskipun kedua sistem ini telah memberikan kontribusi signifikan terhadap efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di Diskominfo Kabupaten Sumenep, tantangan berupa error sistem, keterbatasan infrastruktur, dan kapasitas SDM masih perlu diatasi secara komprehensif. Rekomendasi yang diajukan meliputi perbaikan berkelanjutan sistem SIPD, peningkatan infrastruktur teknologi informasi, dan pelatihan berkelanjutan bagi SDM harus menjadi prioritas bagi Diskominfo dan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Dengan komitmen

dan strategi yang tepat, transformasi digital di Sumenep dapat mencapai potensi penuhnya, menghasilkan pengelolaan keuangan yang lebih optimal dan pelayanan publik yang lebih responsif dan efektif bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Erwin, E., P, A. C., Pasaribu, A. W., Novel, N. J. A., Sepriano, Thaha, A. R., Adhichandra, I., Suardi, C., Nasir, A., & Syafaat, M. (2023). *Transformasi Digital* (Issue June).
- Hadiono, K., & Noor Santi, R. C. (2020). Menyongsong Transformasi Digital. *Proceeding Sendiu, July*, 978–979.
- Jhon W Creswell. (2017). *Research Desain Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar Yogyakarta.
- Murwati, S. R., & Asroriyah, N. (2020). Studi Exploratif, Transformasi Pendidikan dalam Menghadapi Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19). *JPT: Jurnal Pendidikan Tematik, 1*(3), 166–171.
- Pangandaheng, F., Maramis, J. B., Saerang, D. P. E., Dotulong, L. O. H., & Soepeno, D. (2022). Transformasi Digital: Sebuah Tinjauan Literatur Pada Sektor Bisnis Dan Pemerintah. *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi, 10*(2), 1106–1115. <https://doi.org/10.35794/emba.v10i2.41388>
- Publik, P., & Dan, P. (2023). *Digitalisasi Birokrasi Dalam Meningkatkan*. 7(1), 33–46.
- Rifdan, Haerul, Sakawati, H., & Yamin, M. N. (2024). Analisis penerapan e-government dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di kecamatan tallo kota makassar. *Jurnal Governance and Politik*



fisip.publiccorner@wiraraja.ac.id

ejournalwiraraja.com

(JPG), 4, 49–61.

Soraya, D., Subiyakto, R., & Setiawan, R. (2023). Analisis Perkembangan Smart Government Dalam Pemanfaatan Teknologi Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 Di Kota Tanjungpinang (Studi Kasus Diskominfo). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.24198/jane.v15i1.39543>

Vol 20, nomor 1, Juni 2025
ISSN 2443-0714 E-ISSN 2621-475X